Action Research Literate
Vol. 8, No. 1, Januari 2024
ISSN: 2808-6988

Studi Kasus Peran Sultan Tidore dalam Proses Pengambilan Kebijakan Kawasan Khusus Ibukota Sofifi di Provinsi Maluku Utara

M Sahrul Fikri Samson[1], Syahrul Hidayat[2]
Universitas Indonesia, Indonesia
[*] Email untuk Korespondensi: msahrulfikri94@gmail.com[1], syahrul.hidayat@gmail.com[2]

Kata kunci:

politik lokal
kesultanan
institusi infromal

Keywords:

local politics
sultanate
information institutions

ABSTRAK

Di negara-negara yang sedang berkembang terdapat kecenderungan masyarakatnya mulai meninggalkan nilai-nilai tradisional dan sedang berupaya untuk menjadi masyarakat yang modern. Pada kondisi seperti ini masyarakat berada pada posisi transisi antara meninggalkan nilai-nilai lama menuju nilai-nilai yang lebih baru. Akan tetapi dalam transisi tersebut, terdapat elite-elite lama yang masih berusaha mempertahankan pengaruhnya-meskipun kondisi sosial, budaya dan politik telah mengalami perubahan, seperti dorongan partisipasi warga dalam politik yang lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi mengenai peningkatan peran sultan di era demokrasi dalam konteks membangun peran dalam masyarakat serta peranya seabagai pemimpin informal dalam memengaruhi institusi formal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena mampu mengeksplorasi secara mendalam dan detail mengenai sebuah fenomena sosial dan masalah manusia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam meningkatkan perannya Sultan Husain Syah lebih menekan pada peran simbolik untuk membangun citra positif dalam masyarakat. Peningkatan peran tersebut yang kemudian membutnya dapat memengaruhi peran institusi formal dengan dominasi peran dan gagasannya dalam sebuah proses pengeambilan kebijakan. Dalam hal ini adalah proses pengambilan kebijakan Kawasan Khusus Ibukota Sofifi di Provinsi Maluku Utara.

In developing countries there is a tendency for people to abandon traditional values and are working towards becoming a modern society. In these conditions society is in a transitional position between abandoning old values to newer values. But in that transition, there are old elites who are still trying to maintain their influence – even though social, cultural and political conditions have changed, such as encouraging citizen participation in broader politics. This study aims to analyze and identify the increasing role of sultans in the democratic era in the context of building roles in society and their role as informal leaders in influencing formal institutions. The approach used in this study is a qualitative approach. The qualitative approach was chosen in this study because it is able to explore in depth and detail about a social phenomenon and human problems. The results of this study show that in increasing his role, Sultan Husain Shah put more emphasis on the symbolic role to build a positive image in society. This increase in role which then requires it can affect the role of formal institutions with the dominance of their roles and ideas in a policy-making process. In this case, it is the policy-making process of the Sofifi Special Capital Region in North Maluku Province

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY-SA .
This is an open access article under the CC BY-SA license.

PENDAHULUAN

Di negara-negara yang sedang berkembang terdapat kecenderungan masyarakatnya mulai meninggalkan nilai-nilai tradisional dan sedang berupaya untuk menjadi masyarakat yang modern (Arianto, 2024). Pada kondisi seperti ini masyarakat berada pada posisi transisi antara meninggalkan nilai-nilai lama menuju nilai-nilai yang lebih baru. Akan tetapi dalam transisi tersebut, terdapat elite-elite lama yang masih

berusaha mempertahankan pengaruhnya-meskipun kondisi sosial, budaya dan politik telah mengalami perubahan, seperti dorongan partisipasi warga dalam politik yang lebih luas.

Pergeseran atau transisi ke arah demokrasi seperti liberalisasi politik juga terjadi di Indonesia pasca Orde Baru (Sofianto, 2011). Hal ini dibuktikan dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi sebagaimana Klinken (2007) berpendapat bahwa otonomi daerah menjadi penyebab dari kembalinya pemimpin tradisional seperti para sultan. Peran mereka mulai muncul dalam dinamika politik lokal di Indonesia karena desentralisasi telah memberi ruang baru untuk tampil dalam ranah public lebih banyak dari sebelumnya (Rakhman & Haryadi, 2020). Dalam penelitianya Klinken menyebutkan terdapat setidaknya 23 Kesultanan atau Kerajaan yang mencuat pasca Orde Baru. Namun munculnya kesultanan atau kerajaan di tingkat lokal tersebut tidak serta merta mengembalikan hegemoni meraka dan mampu mengangkat profil kesltanannya. Sebagian besar sultan yang muncul kembali tersebut gagal membangun kekuatan politiknya karena adanya perubahan sosial dalam masyarakat yang cenderung tidak simpati terhadap kerajaan yang dianggap sebagai perwujudan dari feodalisme.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, era demokrasi saat ini memberi ruang bagi elite lama seperti para pemimpin informal untuk bertindak sebagai pemimpin kerajaan atau sultan pada masa lampau (Alfian, 2013). Namun tidak menutup kemungkinan jika mereka yang tidak mampu beradaptasi atau masih mennggunakan cara-cara lama yang cenderung feodal lambat laun akan tergerus oleh perubahan yang terjadi dalam masyarakat sehingga kepatuhan yang sebelumnya telah terjalin, pelan-pelan akan hilang oleh arus demokratisasi. Pada kondisi tersebut, seorang sultan sebagai entitas pemimpin informal diharuskan mengikuti perkembangan demokrasi, yaitu dengan menggunakan cara-cara yang lebih dinamis untuk mempengaruhi masyarakat, misalnya melakukan pendekatan dengan masyarakat sebagai penyambung aspirasi atau lain sebagainya demi untuk membangun citra positif dihadapan masyarakat. Selain itu adanya prestise dari latar belakang sosial sebagai sultan membuat mereka sangat dihormati dalam masyarakat dan membuat mereka mempunyai modal sosial yang berbeda dengan elite-elite lain.

Salah satu sultan yang terlihat mampu memainkan ruang baru dalam otonomi daerah dan berusaha beradaptasi dengan demokratisasi adalah Sultan Tidore yang berada di Provinsi Maluku Utara. Di Maluku Utara, terdapat empat Kesultanan Islam yang membentuk aliansi Moloku Kie Raha atau persatuan empat kerajaan. Istilah Moloku Kie Raha menggambarkan empat otoritas di Maluku, yakni: Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo (Amal, 2016). Keempat Kesultanan ini juga mengalami pasang surut atau dinamika yang hampir sama dengan kesultanan atau kerajaan lain di Indonesia, terutama setelah Orde Baru.

Pada beberapa tahun terakhir peran Sultan Tidore terbilang menonjol. Sultan Tidore dinilai mampu meningkatkan perannya dalam dinmika politik di Maluku Utara salah satunya adalah dengan mengintervensi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut adalah rencana pemebentukan Dearah Otonomi Baru (DOB) Ibukota Sofifi sejak Maluku Utara dimekarkan menjadi provinsi baru pada tanggal 12 Oktober 1999 dalam UU No 46 Tahun 1999. Undang-undang tersebut juga menetapkan Sofifi sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara. Namun karena belum adanya infastruktur yang menunjang, maka ibukota provinsi Maluku Utara saat itu untuk sementara ditempatkan di Kota Ternate.

Namun status Sofifi sebagai ibukota provinsi masih belum menemui suatu kepastian. Pengesahan Sofifi sebagai daerah otonom masih menemui jalan buntu, karena adanya moratorium dari pemerintah pusat dan Maklumat Sultan Tidore Nomor 01/KT/2010 yang dikeluarkan oleh Sultan Djafar Sjah yang berisi penolakan mengenai DOB Sofifi. Pengaruh Sultan Tidore untuk menolak wacana DOB Sofifi sulit untuk dibendung. Walaupun DOB Sofifi mendapat dukungan dari masyarakat Sofifi dan pemerintah daerah, status Sofifi sebagai daerah otonom belum juga dikabulkan oleh pemerintah pusat karena adanya penolakan tersebut. Bahkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan dearah dengan melakukan komunikasi secara persuasif dengan Sultan Tidore tidak dapat menemui keputusan untuk menjadikan Sofifi sebgai daerah otonom. Hingga pada akhirnya status Sofifi mendapat persetujuan dari Sultan Tidore, akan-tetapi dalam format yang berbeda yaitu tidak diberlakukannya DOB Sofifi melainkan ditetapkan sebagai Kawasan Khusus Ibukota yang tidak memiliki otoritas sebagaimana ibukota pada umumnya.

Dalam penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa kehadiran demokrasi memberikan kebebasan bagi siapa saja untuk berpartisipasi dalam proses politik tanpa mengenal status sosial dan latar belakang. Namun pada sisi lain perkembangan demokrasi juga dapat memberikan ruang atau kesempatan bagi elite lama yaitu para sultan untuk kembali memainkan perannya dalam dinamika politik, baik dalam masyarakat atau pun pemerintah di tingkatan nasional maupun lokal, apalagi mereka memiliki status sosial yang membuatnya dihormati oleh masyarakat. Sultan Tidore merupakan salah satu dari para sultan yang dinilai mampu memainkan peran tersebut. Peran penting Sultan Tidore yang kembali muncul pada masa awal Reformasi justru mampu bertahan dan dapat membagun pengaruhnya dalam proses kebijakan politik di Maluku Utara yaitu pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Sofifi yang berujung dengan ditetapkannya Sofifi sebagai kawasan khusus ibukota tanpa adanya pembentukan daerah otonom.

Berdasarkan permasalahan tersebut memunculkan pertanyaan yang harus di analisis yaitu mengapa Sultan Tidore dapat meningkatkan peran politiknya sehingga walaupun hanya sebagai pemimpin informal tetapi mampu mengintervensi proses pengambilan kebijakan Kawasan Khusus Ibukota Sofifi?

Secara umum penelitian ini hadir dengan tujuan memahami aspek-aspek dinamika politik lokal selain pemilu (yaitu peran seorang pemimpin informal) mengenai peran Sultan (Sila, 2019) sebagai pemimpin institusi informal dalam proses kebijakan politik di Maluku Utara. Atau pada tataran yang lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Sultan Tidore dapat meningkatkan perannya sebagai pemimpin informal yang mengintervensi proses pengambilan kebijakan Kawasan Khusus Ibukota Sofifi Provinsi Maluku Utara.

Kajian mengenai politik kerajaan dan perkembangan demokrasi cukup banyak yang ditemukan. Dalam kajian-kaijan tersebut menjelakan bahwa para pemimpin kerjaan di dunia ya, mengalami kondisi atau dihadapkan dengan kondisi yang mengharuskan adanya perubahan. Kajain-kajian tersebut menyebutkan bahwa perkembangan demokrasi justru memperlemah posisi seorang Raja atau Kaisar untuk itu mereka dituntut agar dapat beradaptasi dengan perkembangan demokrasi. Karena dalam sistem negara modern yang cenderung demokratis membuat peran dari para raja-raja ini akan semakin sempit dan bahkan hilang sama sekali (Smith, 2012). Sedangkan di Indonesia, terdapat banyak kaijian yang membahas menganai adanya pergesaran yang terjadi pada pemimpin-pemimpin kerajaan di Indonesia. Penyebab yang mendasari hal tersebut adalah karena semenjak era Kolonial kerjaan dan kesultanan di Indonesia di kontrol demi kepentingan kolonial (Wahid, 2021). Memsauki era kemerdekaan posisi para raja dan sultan semakin tersudutka karena kedekatan mereka dengan kolonial sehingga kekuasaan-kekusaan mereka diambil oleh negara kecuali Kesultanan Yogyakarta yang diberi keistimewaan oleh negara. kendati demikian masih terdapat pemimpin kerajaan yang mampu mempertahankan hegemoni terhadap masyarakat. (Ricklefs, 1981)

METODE

Penelitian ini didasarkan pada metode penelitian kualitatif. Peningkatan peran Sultan Husain Syah melalui produksi simbol, serta dominasi peran dalam kebijan institusi formal. Data dalam penelitian ini berdasarkan wawancara terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Seperti masyarakat, akademisi, wartawan, dan para pemimpin dan elite institusi formal. Data sekunder yang diperoleh dari liputan media, arsip/dokumen, jurnal akademis, dan wawacara dengan para pakar lokal juga digunakan untuk menyempurnakan penelitian ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produksi Simbol Berwujud (Corporeal) Sultan Husain Syah

Dari hasil penelitian ini, penggunaan atau produksi simbol berwujud (Corporeal) nampaknya tidak dominan digunakan oleh Sultan Husain Syah untuk meningkatkan perannya dalam masyarakat, karena Sultan Husain Syah dalam kapasitas sebagai sultan yang tidak lagi memiliki kedudukan atau posisi secara formal dalam pemerintahan yang memiliki kekuasaan. Sehingga penggunaan siombol tersebut jarang ditemui. Hal ini karena penggunaan simbol corporeal lebih menitikberatkan pada elite pemerintah yang memiliki kewenangan atas agenda-agenda kebijkan yang berupa simbol fisik, misalnya pembangunan infrastruktur. Akan tetapi peran yang berbeda justru diperlihatkan oleh Sultan Husain Syah dengan berupaya menjadi penyambung aspirasi dari masyarakat, dan mecoba memberikan instervensi atau masukan kepada pengambil kebijakan yaitu pemerintah sehingga pembangunan tersebut dapat terlaksana.

Sebagaimana pernytaan wartawan yang pernah meliput setiap agenda-agenda Sultan Husain Syah saat melakukan kunjungan atau pertemuan dengan masyarakat. Menurutnya, masyarakat lebih cenderung melihat dari sudut pandang siapa yang melatarbelakangi pemebangunan tersbut. Kecenderungan tersebut muncul karena pandangan meraka yang menilai lahirnya kebijakan yang bersumber dari aspirasi yang disampaikan melalui sultan yang menurut mereka disegani oleh pemerintah. Sehingga aspirasi yang dibawa kemudian dapat dipertimbangkan dan dieksekusi(Wawancara Muhammad Wildan wartawan Sentra News.id 24 November 2023).

Sedangkan dari pihak pemerintah, dalam hal ini Wakil Walikota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen juga menyampaikan pernyataan yang membenarkan proses tersebut (Kadir, Mamentu, & Lambey, 2017). Menurutnya, kedekatan pemerintah dengan Sultan Tidore tidak dapat dipisahkan. Hal ini karena Kesultanan Tidore memiliki andil sejarah yang besar bagi terbentuknya negara Indonesia, sehingga dalam perspektif pemerintahan khususnya pemerintah Kota Tidore Kepulauan memandang sultan sebagai sosok yang sangat dihormati. Muhammad Senen juga membenarkan bahwa ada beberapa kebijakan dari pemerintah misalnya pembangunan infrastruktur berupa perbaikan jalan dan lain-lain, merupakan hasil dari usulan yang diberikan oleh sultan. Namun usulan tersebut kami proses sesuai mekanisme yang berlaku (Wawancara Wakil Walikota Tidore Kepualauan Muhammad Senen, 25 November 2023).

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa produksi simbol berwujud (Corporeal) nampaknya tidak terlalu dominan digunakan oleh Sultan Husain Syah dalam meningkatkan perannya dalam masyarakat. Hal ini karena Sultan Husain Syah dalam kapasitas sebagai Sultan yang tidak memiliki kedudukan secara formal dalam pemerintahan dan bukan elite yang memimpin kekuasaan sehingga penggunaan simbol tersebut jarang sekali ditemukan. Namun peran sultan sebagai penghubung aspirasi masyarakat, ternyata dapat mengintervensi sebuah kebijakan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Walaupun tidak secara langsung Sultan Husain Syah menggunakan peran simbol berwujud dengan membuat kebijakan pembangunan secara fisik berupa sarana atau infrasruktur, akan tetapi masyarakat berpersepsi bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur tersebut merupakan hasil dari aspirasi meraka yang tersalurkan melalui peran Sultan Tidore yaitu Sultan Husain Syah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan simbol berwujud (corporeal) menjadi salah satu peran yang digunakan oleh Sultan Husain Syah meskipun tidak secara langsung dalam membuat keputusan atau kebijakan infrastruktur tersebut.

Produksi Simbol Tidak Berwujud (Incorporeal) Sultan Husain Syah

Dalam hasil penelitian ini, penggunaan simbol tidak berwujud (Incorporeal) merupakan hal yang paling dominan digunakan oleh Sultan Husain Syah untuk meningkatkan perannya dalam masyarakat. Sebagaimana menurut (Nishizaki, 2004), bahwa barang-barang tidak berwujud tidak hanya soal materi tetapi juga soal budaya, sosial dan spiritual. Maka dari itu, dalam hasil penelitian ini menganalisis mengenai produksi simbol tidak berwujud (Incorporeal) dalam beberapa aspek tersebut yaitu aspek budaya, sosial dan spritiual yang digunakan oleh Sultan Husaian Syah dalam meningkatkan perannya

a. Aspek Budaya

Dalam aspek budaya, Sultan Husain Syah terbilang sangat aktif dalam setiap acara, prosesi budaya atau adat istiadat. Hal ini karena kedudukan seorang sultan pada masa sekarang telah bergeser dari yang sebelumnya adalah kedudukan formal menjadi kedudukan informal dalam pemerintahan. Sebagimana Klinken (2007) berpendapat bahwa sultan-sultan di Indonesia saat ini tidak mewailiki diri meraka sebagai penguasa yang diktator, akan tetapi mereka berdiri atas nama kebudayaan atau adat istiadat, identitas, komunitas lokal dan kebaikan bersama.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa produksi simbol tidak berwujud dalam aspek budaya adalah peran yang paling dominan digunakan oleh Sultan Husain Syah. Hal ini terlihat dalam pernyataannya sebagai berikut.

"Walaupun posisi saya sebagai sultan saat ini dalam Kesultanan Tidore yang bukan lagi menjadi lembaga formal seperti jaman dahulu. Tetapi struktur adat atau pemerintahan Kesultanan Tidore sampai saat ini masih ada dan tetap terjaga di setiap wilayah kesultanan walapun tugas dan fungsinya sudah digantikan oleh pemerintah setempat, akan tetapi peran meraka dalam hal budaya atau adat istiadat masih tetap ada dan tidak tergantikan. Dan saya rutin mendatangi acara adat atau festival budaya yang mereka buat. Begitu juga setiap upacara adat kesultanan, saya rutin mengundang meraka untuk datang ke istana Kesultanan Tidore. Kerena tanpa mereka sistem di kesultanan ini tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya" (Wawancara dengan Sultan Husain Syah, 18 November 2023).

Seperti yang telah dijelaskan di atas, pernyataan yang selaras juga disampaikan oleh akademisi Mansyur Djamal. Menurutnya, perangkat adat di bawah Kesultanan Tidore yang masih terhubung sampai saat ini. Sehingga membuat Sultan Husain Syah dapat memainkan peran terutama dalam aspek budaya dengan menggerakan perangkat-perangkat kesultanan yang tersebar disemua wilayah Kesultanan Tidore.

Selain itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh (Nishizaki, 2004) bahwa faktor kunci disini adalah fakta bahwa acara Festival dan upacara menyatukan orang. Tindakan fisik berkumpul ini jika dilakukan secara konsisten dapat membantu menumbuhkan kembali seperti yang disebut Durkheim sebagai "hati nurani kolektif", rasa memiliki yang sarat emosi oleh kelompok masyarakat.dalam hal berbagai perayaan, ikatan emosi bersama ini semakin diintensifkan. Dengan demikian, semua simbol incorporeal yang dibuat oleh Sultan Husain Syah berfungsi sebagai pemersatu masyarakat.

Selama menjadi Sultan Tidore, Sultan Husain Syah membuat acara-acara yang bertujuan membangun budaya dan identitas kesultanan Tidore. Salah satu acara yang dibuat adalah Festival Hari Jadi Tidore yang diselenggarakan oleh pihak kesultanan setiap tanggal 12 April. Kegiatan ini melibatkan semua lapisan masyarakat baik dari luar dan di semua wilayah yang menurut sejarah termasuk dalam wilayah Kesultanan Tidore.

Festival Hari Jadi Tidore merupakan upaya menggali, mengembangkan sekaligus melestarikan warisan sejarah budaya Kesultanan Tidore serta memperkenalkan, mempromosikan Tidore dengan seni budaya, sejarah serta sumber daya alam sebagai daya tarik pariwisata. Daerah yang berusia ± 910 tahun ini jika ditinjau dari sisi sejarah memiliki nilai historis yang sangat strategis dengan ditambah nuansa budaya

yang tumbuh kental mengakar dalam lingkungan masyarakatnya menjadikannya acara ini cukup istimewa (Vidhia, 2023).

Berdasarkan penjelasan diatas, dilihat bahwa kegiatan kebudayaan atau ritual tersebut menarik banyak orang untuk hadir dan menyaksikan. Hal ini terlampir dalam penelitian Vidhia (2023) yang menjelaskan secara grafik daya tarik masyarakat terhadap terselenggaranya kegiatan Festival Hari Jadi Tidore sebagai berikut:

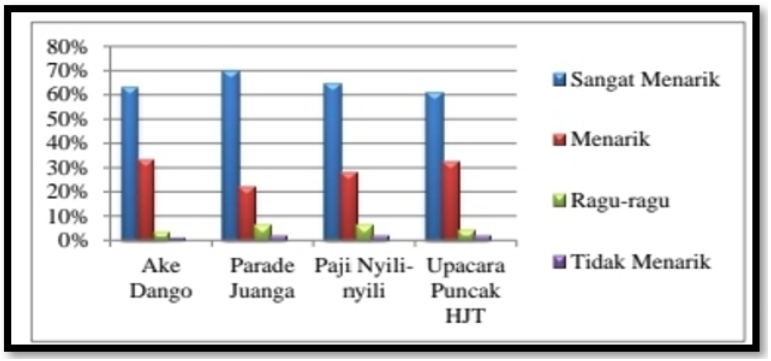

Gambar 1 Daya tarik masyarakat dalam kegiatan Festival Hari Jadi Tidore
Sumber: Grafik daya tarik masyarakat dalam kegiatan Festival Hari Jadi Tidore, Vidhia (2023)

Dilihat dari grafik tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat ketertarikan masyarakat dalam kegiatan Festival Hari Jadi Tidore lebih dari 60%.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui mengapa simbol tidak berwujud (Incorporeal) dalam aspek budaya sangat dominan digunakan oleh Sultan Husain Syah, karena tiga faktor yaitu:

1. Struktur pemerintahan Kesultanan Tidore terikat dengan budaya atau adat istiadat.
2. Walaupun terjadi pergeseran fungsi dari sebelumnya merupakan perangkat pemerintahan yang formal, namun peran budaya atau adat istiadat masih tetap berada pada struktur atau perangkat-perangkat kesultanan.
3. Struktur atau perangkat-perangkat kesultanan masih tetap ada dan terjaga hingga sekarang.
4. Karakter Masyarakat yang masih menjunjung tinggi adata istiadat.

b. Aspek Sosial

Penggunaan simbol incorporeal juga dilakukan oleh Sultan Husain Syah dalam aspek sosial. Hal ini terlihat dalam perannya membangun hubungan atau kedekatan dengan elite-elite lain misalnya para tokoh politik dan pejabat negara hingga petinggi militer dan ulama. Hubungan tersebut ditandai dengan pemberian gelar kehormatan oleh Sultan Husain Syah kepada elite-elite tersebut. Berikut daftar penganugerahan gelar kehormatan dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 1.Daftar Penganugerahan Gelar Kehormatan oleh Sultan Husain Syah

No	Nama	Gelar Kehormatan	Waktu
1.	Joko Widodo - Presiden RI	*Biji Negara Madofo* (Dipertuan Agung Anak Negara)	8 Mei 2015
2.	Laksamana Ade Supandi - KSAL	*Kapita Marinyoa* (Panglima Armada Laut)	25 Juni 2016
3.	Habib Saggaf Bin Muhammad Aljufrie – Ulama	Ngofa Bangsa Imamulummar (Pemimpin Umat Muslim)	27 Mei 2017
4.	Jendral Gatot Nurmantyo - Panglima TNI	*Kapita Malamo Nyili Gulu Gulu* (Panglima Besar di Wilayah Jauh)	8 Juni 2017
5.	Agus Harimuti Yudhoyono - Ketua Umum Partai Demokrat	*Jou Mayor Kadato Kie Nyili Gulu-gulu* (Perwira Muda Kesultanan Tidore di Wilayah Jauh)	27 Januari 2018
6.	Sri Mulyani Indrawati - Menteri Keuangan RI	*Ngofa Bangsa ma Guraci* (Putri Bangsawan Terbaik)	9 Maret 2018
7.	Rizal Ramli - Tokoh Politik	*Ngofa Tidore* (Anak Tidore)	12 April 2018
8.	La Nyalla Mahmud Mattaliti - Ketua DPD RI	*Halifatul Mukarram Ala Jabilittidore* (Perwakilan Sultan Tidore di Wilyah Jauh)	29 Januari 2021

9.	Sakti Wahyu Trenggono - Menteri KKP RI	*Syaikhu Ngolo Ma Oti* (Pemimpin Armada Perikanan)	7 Maret 2022
10.	Laksamana Yudo Margono - KSAL	*Kapita Marinyo Nyili Gulu Gulu* (Panglima Perang Laut Kesultanan Tidore dari Wilayah Jauh)	28 November 2022
11.	KH.Maruf Amin - Wakil Presiden RI	*Nau Manyira Ngofa Kadato Nyili Gulu Gulu* (Pangeran Sulung Anak Adat Kesultanan Tidore di Wilayah Jauh)	11 Mei 2023

Sumber: Dokumentasi Kesultanan Tidore, 2023

Dilihat dari daftar pemberian gelar kehormatan tersebut, terlihat bahwa Sultan Husain Syah bukan sekedar membangun kedekatan emosial dengan elite-elite tersebut, tetapi juga mencoba membangun keterikatan antara elite-elite dengan dirinya. Pemberian gelar kehormatan dapat secara langsung membuat keterikatan yang didasarkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu dan bisa jadi hanya kepentingan pribadi seorang sultan (Juraidah, 2013), sehingga dapat menaikkan pamornya. Selain itu, Sultan Husain Syah juga membangun relasi dengan berbagai kalangan atau elite-elite yang lain. Misalnya, tokoh politik, publik figur, pejabat negara dan lain sebagainya

Selain itu, kapasitas Sultan Husain Syah yang juga seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempermudahnya membangun relasi dengan elite-elite lain dalam hal ini tokoh politik dan pejabat negara. Sedangkan hubungannya dengan masyarakat kerap terlihat dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota DPD. Yaitu melaksanakan agenda DPD, misalnya Reses atau sosialiasi pada masyarakat. Hal ini tentunya menjadi nilai tambah bagi Sultan Husain Syah dalam meningkatkan peran dan pengaruhnya melalui penggunaan simbol incorporeal yakni dalam aspek sosial.

Dalam pandangan masyarakat. Mereka menilai bahwa kedekatan yang terbangun antara mereka dengan Sultan Husain Syah bukan hanya sekadar karena begitu menghormati posisi seorang sultan, terlebih lagidalam kapasitasnya sebagai anggota DPD RI. Hal ini membuatnya lebih dipercaya untuk membawa aspirasi atau keluhan mereka yang kebanyakan terealisasikan setelah diperjuangkan oleh sultan. Sebagaimana pernyataan tokoh masyarakat sebagai berikut

"Hubungan antara sultan dan masyarakat sudah terjalin baik secara turun temurun dan secara tradisi. Hal ini membuat seorang sultan begitu dihargai dan dihormati oleh masyrakat. Sultan Husain Syah adalah contoh seorang sultan yang dapat memainkan peran dalam masyarakat, memang secara kapasitas beliau juga seorang anggota DPD RI, namun bagi kami sebagai masyarakat yang juga warga adat Kesultanan Tidore, hal tersebut justru baik agar aspirasi kami didengar dan dapat disampaikan kepada pemerintah. Jadi hal yang wajar apabila kami menerima kunjungannya dengan sesuatu yang meriah" (Wawancara dengan Ade Muhidin, 20 November 2023).

c. Aspek Spritual

Tidak dapat dipungkiri bahwa kesultanan-kesultanan di Indonesia kerap membaurkan antara budaya tradisi dan keislaman. Antara aspek budaya dan sosial tidak terlepas dan terhubung dengan aspek spiritual atau keagamaan yang melekat dengan tradisi atau adat istiadat dalam kesultanan.Ini dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan spiritual keagamaan yang dilakukan oleh Kesultanan Tidore untuk selalu menjaga nilai-nilai tradisi yang ditinggalkan oleh para leluhur.

Terdapat empat kegiatan tradisi yang masih dipertahankan dan menjadi nilai tersendiri bagi masyarakat adat Tidore (Sugianto, Buamona, Limatahu, Abdullah, & Permata, 2022). Misalnya, tradisi keagamaan dimana setiap tahun pada bulan Ramadhan, masyarakat dan Kesultanan Tidore mengadakan ritual doa-doa untuk menyambut datangnya malam lailatul qodar dan perayaan keagaaman lainnya seperti peringatan Maulid Nabi Muahammad telah menjadi bagian dari tradisi keagamaan yang masih berlangsung sampai saat ini (Arlina, 2020).

Dalam penggunaan simbol incorporeal juga terlihat dalam aspek spiritual. Seperti yang dijelaskan diatas, penggunaan simbol ini terlihat dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan oleh Kesultanan Tidore seperti peringatan malam Lalilatul qodar dan Maulid Nabi Muhammad.Selain itu, Sultan Hsuain Syah juga meluncurkan kalender Hijriah Kesultanan Tidore sebagai rujukan mengenai penanggalan dan penetapan 1 Syawal dan Ramadhan yang didasarkan pada naskah kuno kesultanan.

Dominasi Peran Kepemimpinan Informal Sultan Husain Syah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Sultan Husain Syah mampu meningkatkan perannya dalam masyarakat. Peningkatan peran tersebut yang kemudian menguatkan modal sosialnya sehingga mampu untuk memengaruhi atau mendominasi suatu proses pengambilan kebijakan yang dibuat oleh institusi formal yakni pemerintah daerah. Hal ini tentu tidak terlepas dari kedudukannya sebagai Sultan Tidore, walaupun pada

saat ini Kesultanan Tidore bukan lagi menjadi bagian dari institusi formal dan hanya menjadi institusi informal yang berada diluar pemerintahan.

Bentuk dominasi peran yang dilakukan oleh Sultan Husain Syah dalam memengaruhi sebuah proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah (Ashari, Nor, Jamsari, Ahmad, & Noh, 2020), terlihat dari proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah mengenai rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Sofifi. Dalam proses kebijakan tersebut, Sultan Husain Syah menjadi pihak yang kontra atas terselengaranya rencana kebijakan yang dimaksud. Sehingga proses kebijakan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Ibukota Sofifi menemui jalan buntu

Alasan Sultan Husain Syah menjadi pihak yang kontra atas terselenggaranya rencana kebijakan DOB Sofifi atas dasar Maklumat Sultan Tidore Nomor 01/KT/2010 yang ditandatangai oleh sultan sebelumnya yaitu Sultan Djafar Syah pada tahun 2010. Dalam maklumat tersebut berisikan penolakan secara tegas rancana pemerintah daerah membentuk daerah otonomi baru atas ibukota Sofifi dan menegaskan bahwa Sofifi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kota Tidore Kepulauan.

Penolakan dari Kesultanan Tidore menjadi alasan yang paling banyak dibicarakan. Seperti pada pernyataan akademsi Mansyur Djamal. Menurutnya, maklumat yang diberikan oleh Sultan Tidore kepada pemerintah tidak hanya bersifat peringatan atau teguran, melainkan bersifat instruktif yang mewajibkan semua masyarakat adat yang berada dalam Kesultanan Tidore harus menaatinya. Inilah yang kemudian menjadi perhatian dan kendala yang serius bagi pemerintah.

Berdasarkan pengolahan data media online dengan NVivo 12 Plus. Menunjukan bahwa 54% alasan penolakan kebijakan pembentukan Sofifi sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) oleh pemerintah provinsi, didasarkan pada keputusan Kesultanan Tidore. Hal ini terlihat dari presentase gambar berikut. Sedangkan alasan lainnya yaitu moratorium dari pemerintah pusat, hanya berkisar 29.00 % dan alasan perbedaan visi pembangunan dari elite-elite atau institusi-institusi yang terkait dalam kebijakan tersebut hanya berkisar 16.00 % saja. Sebagaimana yang tergambar dari data berikut ini.

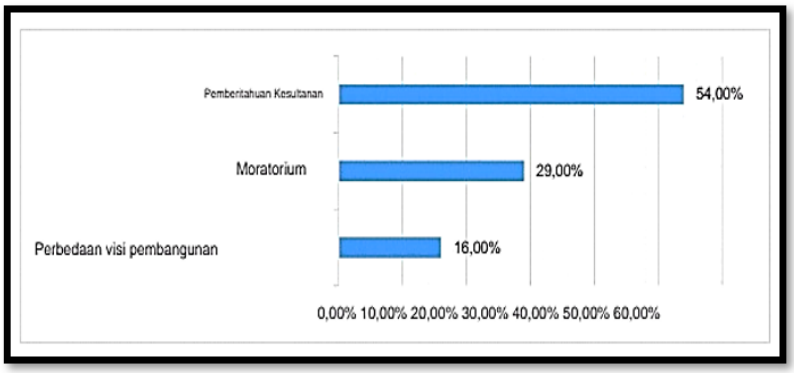

Gambar 2. Alasan Menolak DOB Sofifi
Sumber: Analisis media online Menggunakan Nvivo 12 Plus (2023)

Sedangkan pada sisi lain, pihak pemerintah Kota Tidore kepulauan tetap berupaya agar DOB Sofifi tetap terlaksana karena merupakan janji kampanye walikota dan wakil walikota Tidore Kepulauan Muhammad Ali dan Muhammad Senen di depan masyarakat Oba (Sofifi). Mereka menjanjikan akan mendukung penuh pemberian daerah otonomi ibukota Sofifi dan menjadi perioritas mereka apabila terpilih dalam pemilahan walikota Tidore Kepulauan tahun 2016. Namun komitmen atau janji tersebut tidak dapat terlaksana.

Pemerintah Kota Tidore kepulauan pada tahun 2019 juga pernah menjalaskan bahwa alasan mengapa rencana kebijakan DOB Sofifi belum juga terlaksana kareana ada dua hal yang sangat mendasar menyebabkan rencana kebijakan tersebut tidak dapat direalisasikan. Pertama, karena adanya moratorium dari pemerintah pusat sehingga proses rencana kebijakan daerah otonomi baru ibukota Sofifi tidak bisa dilaksanakan. Kedua, karena adanya Maklumat dari Kesultanan Tidore yang menolak kebijakan tersebut

Sedangkan dalam pembahasan rencana kebijakan DOB Sofifi dalam rapat paripurna DPRD Kota Tidore Kepulauan juga tidak menemukan solusi. Hal ini karena pada saat berlangsungnya rapat paripurna terjadi kekacauan yang membuat rapat tersebut harus dihentiakan.

Salah satu penyebab terjadinya kekacauan tersebut karena dalam rapat tersebut terbagi dalam dua kubu. Yaitu anggota DPRD yang berpihak pada Maklumat Kesultanan Tidore, dan anggota DPRD yang memihak pada kebijakan DOB Sofifi. Selain itu ada penyebab yang lainnya, yaitu ada sekolompok masa yang mengatasnamakan suku Tidore memaksa masuk dan membubarkan rapat tersebut (Awaluddin, Faitanu, & Hasan, 2018).

Kondisi yang serupa juga terjadi dalam institusi DPRD Provinsi Maluku Utara.yaitu terjadi pembelahan antara anggota DPRD yang pro dan kontra dengan proses kebijakan DOB Sofifi. Anggota DPRD yang kontra terhadap kebijakan tersebut sebagian besar adalah berasal dari Tidore yang mendukung Maklumat Kesultanan Tidore. Walaupun demikian, pihak DPRD juga mendorong pemerintah provinsi Maluku Utara agar segera menyelesaikan persoalan Daerah Otonomi Baru (DOB) ibukota Sofifi. Namun disisi lain DPRD provinsi Maluku Utara juga seakan melepas tangan terhadap proses pengambilan kebijakan Daerah Otonomi Dearah (DOB) ibukota Sofifi dengan menganggap bahwa masalah kebijakan DOB Sofifi bukan di ranah DPRD provinsi, tetapi berada pada DPRD Kota Tidore Kepualauan dan pemerintah Kota Tidore Kepulauan karena sebagai daerah induk dari wilayah Sofifi. Sebagaimana pernyataan Anggota DPRD provinsi Maluku Utara Rahmi Husen sebagai berikut.

Fakta ini menggambarkan bahwa pengaruh Kesultanan Tidore dalam hal ini Sultan Husain Syah mampu memberikan tekanan yang sangat berdampak terhadap terjadinya kesimpangsiuran status DOB Sofifi. Selaras dengan pernyataan anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan Ardinsyah Fauzi yang menyatakan bahwa dampak dari Maklumat Kesultanan Tidore mengakibatkan ketiadak pastian status Sofifi sebagai dareah otonomi baru. Hal ini menyebabkan pembelahan yang terjadi di DPRD. Sedangkan pemerintah Kota Tidore Kepulauan, yaitu walikota dan wakil walikota memiliki sikap ganda terhadap kebijakan DOB Sofifi. Karena isu Sofifi sebagai daerah otonomi baru menjadi alat politik saat kampanye pada pemilihan walikota. Disisi lain mereka mendukung Maklumat dari Kesultanan Tidore yang menolak wacana pemberian daerah otonomi Sofifi.

Sebagai pihak yang bersikeras mendorong proses kebijakan daerah otonomi baru Sofifi. Pemerintah provinsi Maluku Utara mengalami permasalahan yang sama. Karena belum mendapat persetujuan dari pemerintah Kota Tidore Kepulauan sebagai daerah induk pada wilayah Sofifi. Sehingga pelaksanaan proses kebijakan tersebut tidak bisa dilakukan. Kendati demikaian, pemerintah daerah tetap berupaya dengan mendorong pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk melakukan mediasi dengan pihak Kesultanan Tidore agar menerima proses kebijakan tersebut. Namun proses mediasi tersebut tidak pernah terjadi.

Selain itu, pemerintah provinsi Maluku Utara juga melakukan mediasi dengan pemerintah pusat yakni presiden Joko Widodo dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencabut moratorium DOB Sofifi. Akan tetapi kebijakan tersebut ternyata bukan lagi menjadi prioritas pemerintah pusat karena berbagaa pertimbangan, salah satunya karena ada penolakan dari Kesultanan Tidore. Pemerintah pusat kemudian menyarankan agar kebijakan pemekaran DOB Sofifi diganti dengan kebijakan Kawasan Khusus tanpa melalui proses DOB. Dalam merespon keinginan pemerintah pusat tersebut. Gubernur Maluku Utara AbdulGani Kasuba kemudian melakukan mediasi dengan Kesultanan Tidore dalam hal menyamakan persepsi mengenai rencana kebijakan pembentukan Kawasan Khusus Ibukota Sofifi tanpa adanya pemberian daerah otonomi baru. Rencana kebijakan tersebut kemudian disambut baik oleh Sultan Husain Syah. Hal ini memberikan fakta bahwa bahwa Sultan Husain Syah dapat memegang peran penting dan berhasil menjadi penentu dalam proses politik di pemerintahan pada provinsi Maluku Utara yaitu dalam kebijakan Kawasan Khusus Ibukota Sofifi.

Selanjutnya Kemendagri kemudian melakukan kunjungan ke Maluku Utara yang bertujuan untuk melakukan pertemuan yang dihadiri staf ahli Gubernur Idham Umasangadji, ketua dan wakil ketua DPRD Kota Tidore Kepualauan dan unsur akademisi yang ada di Kota Tidore Kepualauan, Bobato Kesultanan Tidore, Tokoh Pemuda dan Tokoh Mayarakat. Dalam pertemuan tersebut. Asep Fajar Kuniawan selaku staf khusus Mendagri, mengungkapakan bahwa tidak ada agenda untuk membentuk DOB Sofifi. Menurutnya, keberadaan Kesultanan Tidore tentunya harus menjadi perhatian dan tidak hanya mengenang pelaku sejarah tetapi bagaimana warisan yang telah ditanamkan harus tetap ada dan dipertahankan.

Dari penjelasan di atas, dapat memberikan gambaran bahwa Sultan Husain Syah dan mendominasi dominasi perannya sebagai elite institusi informal yang dapat memperangaruhi dan dapat merubah peran dari institusi formal. Sebagaimana yang sebutkan oleh (Helmke & Levitsky, 2012) bahwa peran dari institusi informal yang mendominasi proses politik dalam institusi formal. Selain itu ketidak berdayaannya instiusi-institstusi formal yang dalam pembahsan ini adalah pemerintah provinsi Maluku Utara, DPRD provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kota Tidore Kepualauan dan DPRD Kota Tidore Kepualauan, tidak mampu dan efektif menjalankan peran dan fungsinya dengan baik dalam proses pengambilan kebijakan pemberian Daerah Otonomi Baru (DOB) Sofifi. Sehingga dalam proses politik menyangkut dengan kebijakan tersebut justru didominasi oleh peran institusi informal dalam hal ini pihak Kesultanan Tidore. Penjelasan tersebut senada dengan yang disebutkan oleh (Helmke & Levitsky, 2012) yang menjelaskan bahwa perubahan yang dialami oleh institusi informal disebabkan oleh lemahnya institusi formal. Kelemahan tersebut dilihat dari peran yang tidak efektif dijalankan oleh institusi formal, sehingga dapat memberikan dorongan kepada institusi informal untuk berperan dominan menempati peran dari institusi formal.

Diskursus Proses Kebijakan Kawasan Khusus Ibukota Sofifi dan Kekuatan Gagasan Sultan Husain Syah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa Kesultanan Tidore mampu mendominasi peran dari institusi-institusi pemerintahan di provinsi Maluku Utara dalam hal proses kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) Sofifi. Dalam dominasi peran tersebut, harus dibarengi dengan gagasan, sehingga dapat menguatkan peran dominasinya. Pada bagain ini, mencoba menganalisis mengenai bagaimana kekuatan gagasan atau pikiran Sultan Husain Syah dalam proses pengambilan kebijakan, dari proses kebijakan yang sebelumnya yaitu kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) Sofifi yang kemudian diganti menjadi kebijakan Kawasan Khusus Ibukota Sofifi.

Sejak direncanakanya pemekaran provinsi Maluku Utara dari provinsi induknya yaitu Maluku pada tahun 1999. Perdebatan mengenai ibukota provinsi Maluku Utara mulai diperbincangkan. Hal ini terlihat dari perdebatan anatar pihak Kesultanan Ternate yang dipimpin oleh Sultan Mudaffar Syah dan pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah yang saat itu beribukota di Sosiio Tidore. Kesultanan Ternate waktu itu merekomendasikan Sidangoli untuk menjadi calon ibokota provinsi. Hal ini karena Sidangoli merupakan merupakan bagian dari wilayah Kesultanannya. Namun pemerintah Halmahera Tengah merekomendasikan Sofifi sebagai calon ibukota provinsi. Sedangkan Halmahera tengah dan Sofifi merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Tidore (Wijaya 2021).

Kendati demikian, Kesultanan Ternate tatap berupaya untuk menjadikan Sidangoli sebagai ibukota provinsi. Namun pemerintah daerah kabupaten Maluku Utara dan pemerintah pusat tidak menyetujui permintaan Kesultanan Ternate. Pemerintah pusat akhirnya menetapkan Maluku Utara sebagai provinsi yang ibukota provinsinya bertempat di Sofifi melalui Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999. Akan tetapi dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa ibukota provinsi Maluku Utara untuk sementara berada di Kota Ternate, sembari menyiapkan pembangunan infrastruktur untuk pembangunan ibukota Sofifi (Klinken 2007).

Pemerintah Provinsi Maluku Utara baru mulai melakukan aktifitas pemerintahan di Sofifi pada tahun 2010 setelah 11tahun beraktifitas di Kota Ternate. Hal ini karena sarana dan prasarana seperti kantor pemerintahan sudah dibangun di Sofifi misalnya kantor Gubernur provinsi Maluku Utara, walaupun hampir sebagian besar sarana pemrintahan masih berada di Kota Ternate. Walaupun demikian, pemerintah provinsi tetap berupaya unuk mengusulkan rencana penetapan Daerah Otonomi Baru Sofifi untuk memperjelas status Sofifi sebagai ibukota provinsi. Namun upaya tersebut terhambat oleh penolakan-penolakan yang beranggapan bahwa Sofifi tidak harus menjadi daerah otonomi baru.

Penolakan tersebut muncul dari pihak Kesultanan Tidore yang secara resmi mengeluarkan Maklumat Sultan Tidore untuk menolak rencana kebijakan pemberian daerah otonomi tersebut. Dalam maklumat kesultanan tersebut berisikan penjelasan yang terdiri dari tiga poin. Pertama, menjelaskan bahwa penerapan nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat adat Kesultanan Tidore akan semakin sulit jika terjadi pemekaran Sofifi sebagai daerah otonomi barau. Sebab, pemberian daerah otonomi tersebut bisa memutuskan hubungan sosial budaya jika Sofifi menjadi daerah otonom terpisah dari daerah Tidore Kepulauan. Kedua, adalah masalah wilayah kesultanan yang semakin hari semakin dipersempit. Hal ini karena wilayah-wilayah Kesulatan Tidore telah terbagi menjadi beberapa daerah otonom seperti Halmahera Tengah, Halmahera Barat, Halmahera Timur dan Papua. Ketiga, menegaskan kepada pemerintah provinsi Maluku Utara agar tidak memaksakan kehendaknya untuk menetapkan Sofifi sebagai daerah otonomi baru. Jika tetap memaksakan hal tersebut, maka ibokota provinsi harus pindah ke kabupaten lain.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, bahwa penolakan terhadap proses kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) Sofifi dimulai saat Kesultanan Tidore mengeluarkan Maklumat Sultan Tidore yang ditandatangani oleh Sultan Djafar Syah. Komitmen atas penolakan tersebut kemudian dilanjutkan oleh Sultan Husain Syah sebagai pengganti Sultan Djafar Syah yang telah meninggal dunia. Hal ini dapat menjadikan Sultan Husain Syah mampu memposisikan dirinya menjadi bagian yang penting dalam proses kebijakan dan bahkan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan atas kebijakan tersebut. Bentuk pengaruh Sultan Husain Syah terlihat dalam pengambilan keputusan atas rencana pembentukan Kawasan Khusus Ibukota Sofifi oleh Pemerintah Pusat yang kebijakannya dinilai sama dengan gagasan dan pikiran yang disampaikan oleh Sultan Tidore.

Keputusan pemerintah pusat mengenai rencana kebijakan tersebut ternyata melahirkan polemik yang menyebabkan pembelahan disetiap intitusi tersebut. Sehingga melahirkan pro dan kontra antar institusi pemerintahan daerah. Sebagaimana yang termuat pada gambar berikut ini:

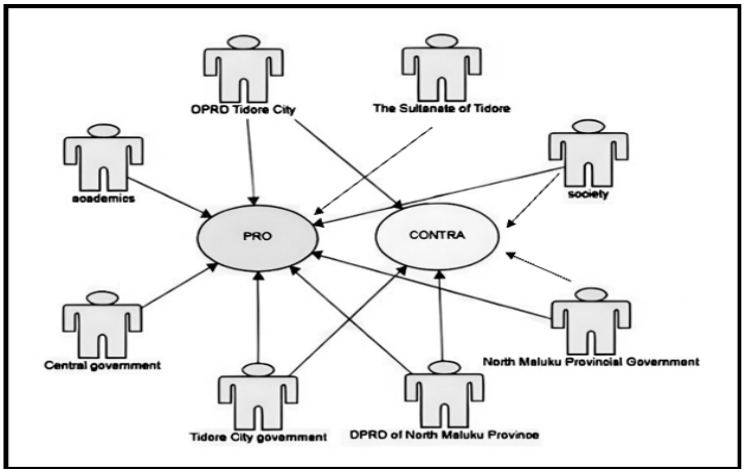

Gambar 3. Pro dan Kontra Terhadap Proses Kebijakan Kawasan Khusus Ibukota Sofifi
Sumber: Olahan Penulis (2023)

Pada gambar di atas menyebutkan delapan kategori yang saling pro dan kontra terhadap proses kebijakan Kawasan Khusus Ibukota Sofifi. Kategori tersebut anatara lain adalah Pemerintah Pusat, Pemerrintah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara, Pemerinatah Kota Tidore Kepulauan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan, Kesultanan Tidore dan Akademisi dan Masyarakat. Selain itu dari gambar tersebut menjelaskan memberikan gambaran adanya inskonsistensi yang menyebabkan pembelahan didalam institusi pemerintahan daerah dan perbedaan pandangan yang terjadi dalam kalangan akademisi dan masyarakat.

Dari diskursus tersebut, dapat dilihat bahwa proses kebijakan Kawasan Khusus Ibukota Sofifi masih menimbulkan pro dan kontra disemua bagian pemerintahan di Provinsi Maluku Utara yang terlibat dalam proses kebijakan tersebut, kecuali dari pihak pemerintah pusat yang menginisiasi rencana kebijakan Kawasan Khusus Ibukota Sofifi dan dari pihak Kesultanan Tidore yang mendukung proses kebijakan tersebut. Hal ini memberikan pembenaran bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat memiliki kesamaan pandangan dengan gagasan yang disampaikan oleh Sultan Husain Syah. Yaitu menjadikan Sofifi sebagai pusat pemerintahan, dan Sofifi masih tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Kota Tidore Kepulauan tanpa adanya proses pemeberian daerah otonom.

Adanya kesamaan kebijakan dari pemerintah pusat dan pandangan Sultan Husain Syah, bukan merupakan sesuatu yang dilihat sebagai kebetulan semata. Akan tetapi kesamaan tersebut merupakan akumulasi dari dominasi peran yang dimainkan oleh Sultan Husain Syah dalam proses pengambilan kebijakan. Hal ini dibuktikan Peran Sultan Husain Syah dalam proses kebijakan Kawasan Khusus Ibukota Sofifi. Dalam proses kebijakan tersebut, Sultan Tidore mampu memposisikan dirinya sebagai bagian penting dalam menentukan kebijakan yang rencanakan oleh pemerintah pussat. Sebagaimana pengakuan Sultan Husain Syah yang menyatakan bahwa dirinya beberapa kali diundang untuk mediasi dengan pemerintah pusat mengenai rencana kebijakan Kawasan Khsusu Ibukota Sofifi. Berikut pernyataan Sultan Husain Syah.

"Saya beberapa kali diundang oleh pemerintah pusat yaitu pak Luhut Panjaitan dan Kemendagri untuk membahas mengenai kebijakan Kawasan Khusus Ibukota Sofifi. Dalam pertemuan tersebut kami membahas soal percebatan pembangunan Sofifi melalui pemerintah pusat. Selain itu dalam pertemuan-pertemuan tersebut kesepakatan, yaitu perlu adanya paying hukum yang dibuat pemerintah dalam kebjikan Kawasan Khusus Ibukota Sofifi. Dalam pertemuan tersebut, saya menyampaikan kepada pemerintah pusat agar dalam penyusunan draf peraturan pemerintah juga perlu mengatur pembentukan Badan Kasawan Khusus yang harus merepresentasikan unsur empat kesultanan di Maluku Utara" (Wawancara dengan Sultan Husain Syah, 18 November 2023).

Dalam penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa peran penting Sultan Husain Syah dalam rencana kebijakan Kawasan Khusus Ibukota Sofifi. Peran penting tersebut dibuktikan dengan keterlibatannya dalam semua proses rencana kebijakan Kawasan Khusus Ibukota Sofifi. Bahkan Sultan Husain Syah mampu mendominasi peran dari institusi-instiutsi pemerintahan di daerah, yaitu Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Dewan Perwakilan Rakyata Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tidore Kepulauan. Hal ini sejelan dengan (Helmke & Levitsky, 2012) changes in shared beliefs and experiences, yang merupakan pikiran atau gagasan dari aktor/elite institusi informal memengaruhi kebijakan institusi formal. Sehingga berkat adanya gagasan aktor/elite tersebut dapat memaksimalkan peran kelembagaan informal dibandingkan institusi atau kelembagaan formal

KESIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini adalah peningkatan peran Sultan Husain Syah dalam politik lokal dilihat dari perannya dalam masyarakat dengan penggunaan modal simbolik. Selain itu dalam dalam kapasitasnya sebagai pemimpin institusi informal, Sultan Husain Syah mamapu mendominasi peran dari institusi-institusi formal dalam merumuskan kebijakan yang akan dikeluarakan. Sehingga kebijakan yang ditetapkan oleh institusi formal, sesuai dengan gagasan yang di inginkan oleh sultan.

Dalam Teori (Nishizaki, 2004) menjelaskan bahwa seorang penguasa dapat membangun peran menggunakan citra posistif yang menjadikannya sangat berpengaruh atau yang disebut dengan identitas sosial positif. Nishijaki (2018) memberikan fakta bahwa identitas sosialpositif memebentuk dasar psikologis dimana seorang aktor atau penguasa dapat membangun dan mengkonsolidasikan dominasi yang kuat dengan menggunakan peran simboliknya. Sejalan dengan penelitian Nishizaki, Sultan Husain Syah mampu membangun identitas sosial positif dengan menggunakan peran simbol-simbol. Adapun simbol yang diciptakan Sultah Husain Syah yaitu menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah dalam pembangunan infarstruktur, membuat acara, kegiatan-kegiatan kebudyaan yang menarik banyak masyrakat, membangun hubungan sosial dengan elite-elite lain, dan membuat kegiatan-kegaiatan spiritual atau keagamaan yang disebut Nishizaki sebagai simbol corporeal dan simbol incorporeal. Namun dalam penelitaiannya, Nishizaki tidak menjelaskan latar belakang sosial aktor atau penguasa yang memproduksi simbol tersebut. Hal ini yang menjadi pembeda dalam penelitian ini, dimana Sultan Husain Syah yang memiliki latar belakang sosialnya sebagai sultan didalam masyarakat, membuatnya tidak lagi bersusah payah membangun citra positif karena dalam pandangan masyarakat, kedudukan seoarang sultan sangat dihormati.

(Helmke & Levitsky, 2012) dalam penelitiannya mengungkapakan bahwa adanya perubahan pada institusi formal disebabkan karena semakin kuatnya institusi formal maka akan memperlemah institusi informal, begitu juga sebaliknya apabila institusi formal lemah maka institusi informal akan memiliki peran yang dominan. Selaras dengan peneletian tersebut, dalam penelitian ini juga menumakan bahwa Sultan Husain Syah sebagai aktor atau pemimpin institusi informal yakni Kesultanan Tidore, mampu mendominasi peran dari institusi formal yakni pemerintahan di daerah. Bentuk dominasi peran yang dilakukan oleh Husain Syah dapat dilihat dalam perannya memengaruhi proses kebijakan yang dicanagkan pemerintah yaitu rencana kebijakan Derah Otonomi Baru Ibukota Sofifi yang kemudian berganti dengan rencana pembentukan Kawasan Khusus Ibukota Sofifi. Selain itu, dalam penelitian ini menemukan bahwa bentuk dominasi peran yang dilakukan oleh Sultan Husain Syah tidak hanya dengan melakukan kritik dan intervensi dan mediasi dengan pemerinatah. Akan tetapi dominasi peran yang dilakukan oleh Sultan Husain Syah juga menggunakan gagasan dan pikiran yang diperjuangkan olehnya.Ini diibuktikan dengan keterlibatannya dalam proses pengambilan kebijakan Kawasan Khusus Ibukota Sofifi. Dimana dalam proses kebijakan tersebut memiliki kesamaan dengan gagasan yang diperjuangkan oleh sultan. Hal ini sejalan dengan penelitian dari (Helmke & Levitsky, 2012) yang menyebutkan bahwa pikiran dari para aktor institusi informal memengaruhi adanya perubahan dari institusi informal.Adanya perubahan kelembagaan formal,memicu adanya perubahan peran lembaga informal berkat adanya gagasan para aktor informal.

Teori (Nishizaki, 2004) dan teori (Helmke & Levitsky, 2012) tentang indentitas sosial positif dan Institusi Informal memiliki kontribusi delam mengetahaui mengapa Sultan Tidore dapat meningkatkan peran politiknya sehingga walaupun hanya sebagai pemimpin informal tetapi mampu mengintervensi proses pengambilan kebijakan Kawasan Khusus Ibukota Sofifi. Kontribusi penting dari kedua teori tersebut menegenai pembentukan simbol-simbol yang diciptakan oleh Sultan Husain Syah. Selian itu dominasi dan gagasan yang dimainkan oleh Sultan Husain Syah sebagai aktor institusi informal. Dalam hal ini mampu berperan penting dan menentukan proses kebijakan di instutsi formal, yaitu kebijakan Kawasan Khusus Ibukota Sofifi di Provinsi Maluku Utara.

REFERENSI

Alfian, M. A. (2013). *Menjadi pemimpin politik*. Gramedia Pustaka Utama.

Amal, M. A. (2016). *Kepulauan rempah-rempah*. Kepustakaan Populer Gramedia.

Arianto, T. (2024). *Realitas Budaya Masyarakat Urban*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Arlina, N. (2020). Kepemilikan Tanah Adat Suatu Kajian Pada Masyarakat Hukum Adat Tidore (Studi Kasus di Kelurahan Folarora, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan). *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, *2*(1), 42–53.

Ashari, M. Z. A. H., Nor, M. R. M., Jamsari, E. A., Ahmad, M. Y., & Noh, N. C. (2020). Kedudukan Putera Raja Dalam Tadbir Urus Mughal: Tumpuan Terhadap Peranan Awrangzib. *Al-Hikmah*, *12*(2), 115–136.

Awaluddin, A., Faitanu, I., & Hasan, H. (2018). Pemekaran Kota Sofifi Maluku Utara sebagai Daerah Persiapan Otonomi Baru Ditinjau dari UU No 23 Tahun 2014. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, *10*(1), 90–98.

Helmke, G., & Levitsky, S. (2012). *Informal institutions and comparative politics: A research agenda*. Edward

Elgar Publishing.
Juraidah, J. (2013). KELOMPOK SOSIAL DALAM TRADISI MODERNITAS SOSIAL MASYARAKAT. *Jurnal Cemerlang*, *1*(1).
Kadir, A. A., Mamentu, M., & Lambey, T. (2017). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan di Kecamatan Tidore Tahun 2015. *JURNAL EKSEKUTIF*, *2*(2).
Nishizaki, Y. (2004). *The weapon of the strong: Identity, community, and domination in provincial Thailand*. University of Washington.
Rakhman, M. A., & Haryadi, H. (2020). Dinamika Peran ngo lingkungan hidup dalam arena politik lokal di provinsi Jambi. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, *4*(4).
Ricklefs, M. C. (1981). A history of modern Indonesia. *(No Title)*.
Sila, M. A. (2019). Kiai Dan Blater: Antara Kesalehan Dan Kekerasan Dalam Dinamika Politik Lokal Di Madura. *Studia Islamika*, *26*(1), 185–200.
Smith, S. B. (2012). *Diana in search of herself: Portrait of a troubled princess*. Random House.
Sofianto, A. (2011). Budaya Politik Masyarakat Lokal: Studi Kasus Di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Pasca Orde Baru. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, *9*(2), 151–159.
Sugianto, H., Buamona, N., Limatahu, K., Abdullah, I. Z., & Permata, I. (2022). Pola Pembelajaran Agama Islam Pada Masyarakat Adat Kesultanan Tidore. *Al-Irfan: Journal of Arabic Literature and Islamic Studies*, *5*(2), 195–216.
Wahid, A. (2021). *Politik Perpajakan Kolonial Di Indonesia: Antara Eksploitasi Dan Resistansi*. Ugm Press.